

ABSTRAK

Salah satu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah menerbitkan izin termasuk izin praktik bidan. Bidan termasuk tenaga kesehatan yang dapat melakukan atau memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara mandiri (praktik mandiri) setelah memenuhi persyaratan Surat tanda registrasi (STR) dan Surat izin praktik (SIP) penelitian ini bertujuan untuk menganalisis (1.) fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam penerbitan izin praktik bidan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku dan (2.) menganalisis mekanisme penerbitan surat izin praktik bidan di kota jambi pasca berlakunya Undang-undang Kesehatan No 17 Tahun 2023. sebagaimana suatu penelitian yuridis normatif digunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dan untuk selanjutnya dilakukan analisis pengolahan bahan hukum secara deskriptif deduktif untuk menghasilkan kesimpulan dalam pernyataan. (1) Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kewenangan yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam menerbitkan surat izin praktik bidan adalah suatu kewenangan mandat dari pemerintah kota jambi. (2) mekanisme penerbitan surat izin praktik bidan dimulai dari tahap kelengkapan administrasi, tahap pininjauan lokasi praktik oleh dinas kesehatan dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, kemudian pendaftaran, persetujuan kelayakan, barulah diterbitkan izin praktik oleh kota jambi.

Kata Kunci: Mekanisme, izin, bidan

ABSTRACT

One of the Investment and One-Stop Integrated Services Services issues permits including midwife practice permits. Midwives include health workers who can carry out or provide health services to the community independently (independent practice) after fulfilling the requirements for a registration certificate (STR) and a practice permit (SIP). This research aims to analyze (1.) the function of the Investment and Services Service Integrated One Stop in issuing midwife practice permits based on current regulations and (2.) analyzing the mechanism for issuing midwife practice permits in Jambi City after the enactment of Health Law No. 17 of 2023. As a normative juridical research, a regulatory approach is used -prompting and conceptualization, and for further analysis the legal material is processed descriptively deductively to produce conclusions in the statement. (1) The research results show that the authority possessed by the One Stop Integrated Services and Investment Service in issuing midwife practice permits is a mandated authority from the Jambi city government. (2) the mechanism for issuing a midwife practice permit starts from the administrative completion stage, the practice location review stage by the health service and the One Stop Integrated Services and Investment Service, then registration, eligibility approval, then the practice permit is issued by the city of Jambi.

Keywords: *Mechanism, permission, midwife*